

PENGUATAN PERAN MASYARAKAT RENTAN DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PELATIHAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA KOMBENG INDAH

Zulkadrin

STAI Sangatta, Indonesia

Email : Zulkadrin94@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
13 Agustus 2026	22 Agustus 2026	30 Agustus 2026

Keywords:

Social Accountability
 Vulnerable Communities
 Village Development
 Community Participation
 Community Empowerment

ABSTRACT

Vulnerable communities in Kombeng Indah Village face limitations in accessing development information, expressing aspirations, and participating in village development monitoring. These conditions may limit their role in promoting transparent and accountable village governance. This community service program aimed to strengthen the capacity of vulnerable communities through social accountability training. The program addressed these issues by improving participants' knowledge and skills in accessing information, expressing aspirations, and participating in development monitoring. A participatory approach was employed through needs identification, interactive lectures, group discussions, case studies, simulations, and *pre-test* and *post-test* evaluations. The program involved 20 participants, including women, youth, adolescents and children, and representatives of ethnic and religious groups. The results showed a 22% increase in participants' knowledge, along with improved abilities to identify development issues and formulate aspirations systematically. The program demonstrates that participatory training can serve as an initial strategy for strengthening the capacity of vulnerable communities to participate in village development in a more inclusive and accountable manner.

Kata Kunci:

Akuntabilitas Sosial
 Masyarakat Rentan
 Pembangunan Desa
 Partisipasi Masyarakat
 Pemberdayaan Masyarakat

ABSTRAK

Masyarakat rentan di Desa Kombeng Indah masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi pembangunan, menyampaikan aspirasi, dan terlibat dalam pemantauan pembangunan desa. Kondisi tersebut dapat membatasi peran masyarakat dalam mendorong tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat rentan melalui pelatihan akuntabilitas sosial. Solusi yang ditawarkan berupa peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, serta melakukan pemantauan pembangunan secara partisipatif. Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, penyampaian materi, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, serta evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Kegiatan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas perempuan, pemuda, remaja dan anak, serta perwakilan kesukuan dan agama. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 22%, disertai kemampuan mengidentifikasi persoalan pembangunan dan merumuskan aspirasi secara lebih terstruktur. Kegiatan menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat kapasitas masyarakat rentan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara lebih inklusif dan akuntabel.

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



PENDAHULUAN

Pembangunan desa menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Paradigma tersebut menuntut tata kelola desa yang tidak hanya berorientasi pada efektivitas program, tetapi juga pada keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena pembangunan yang dirancang tanpa mempertimbangkan kebutuhan warga berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap persoalan lokal. Penelitian mengenai perencanaan pembangunan desa menunjukkan bahwa masyarakat dapat terlibat melalui berbagai tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan rencana pembangunan. Namun, kualitas partisipasi sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan memiliki pengaruh dalam proses tersebut.¹

Persoalan partisipasi menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan masyarakat rentan. Kelompok rentan dapat menghadapi hambatan dalam mengakses informasi, forum pengambilan keputusan, sumber daya, dan pelayanan publik. Dalam pembangunan desa, kondisi tersebut dapat dialami oleh masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan kelompok lain yang memiliki keterbatasan dalam mengakses proses pembangunan. Ro'fah menunjukkan bahwa partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan desa di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Ketersediaan ruang partisipasi secara formal belum otomatis menghasilkan inklusi sosial karena kelompok rentan masih menghadapi keterbatasan untuk terlibat secara substantif dalam proses pembangunan.²

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tidak cukup diukur berdasarkan kehadiran masyarakat dalam forum pembangunan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memahami informasi, menyampaikan kepentingan, memberikan masukan, mempertanyakan kebijakan, dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Kelompok rentan membutuhkan perhatian lebih karena keterbatasan akses dan posisi tawar dapat menyebabkan kebutuhan mereka kurang terwakili dalam proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan yang inklusif membutuhkan penguatan kapasitas masyarakat agar ruang partisipasi yang tersedia dapat digunakan secara efektif.

Persoalan partisipasi tanpa pengaruh juga terlihat dalam penelitian Haryanto, Berenschot, dan Aspinall. Melalui penelitian terhadap forum desa di 18 desa di Indonesia, mereka menemukan bahwa musyawarah desa tidak selalu menghasilkan akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, forum desa berlangsung secara tidak teratur dan masih didominasi elite. Bahkan ketika masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, mereka cenderung menyampaikan tuntutan secara hati-hati dan menghindari kritik langsung terhadap pemerintah desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan forum partisipatif belum tentu menghasilkan hubungan pertanggungjawaban yang kuat antara masyarakat dan pemerintah desa.³

¹ Riza Ayu Nadhiro and Ilmi Usrotin Choiriyah, "Community Participation in Village Development Planning," *Indonesian Journal of Public Policy Review* 25 (2024): 1–19.

² Ro'fah, Astri Hanjarwati, and Jamil Suprihatiningrum, "The Long Road to Social Inclusion : Participation of Vulnerable Groups in Village Development," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2022, 119–229.

³ Haryanto, Ward Berenschot, and Edward Aspinall, "Participation without Accountability : Deliberative Democracy in Village Indonesia," *South East Asia Research* 33, no. 1 (2025): 49–67.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi dan partisipasi yang akuntabel. Masyarakat dapat diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi belum tentu memiliki mekanisme untuk memastikan bahwa pendapat tersebut dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Karena itu, pembangunan desa membutuhkan mekanisme yang menghubungkan partisipasi masyarakat dengan pertanggungjawaban pemerintah. Masyarakat perlu memperoleh akses terhadap informasi pembangunan, ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, serta mekanisme pemantauan dan pemberian umpan balik. Pada sisi lain, pemerintah desa perlu memiliki mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti masukan masyarakat. Hubungan timbal balik tersebut merupakan inti dari akuntabilitas sosial.

Akuntabilitas sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Mekanisme ini dapat mencakup akses informasi, partisipasi, pemantauan, penyampaian aspirasi, pemberian umpan balik, dan dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Ra'is menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dapat menjadi mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa serta meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan dan pelayanan publik. Dengan demikian, akuntabilitas sosial memperluas pemahaman tentang akuntabilitas yang sebelumnya lebih banyak berorientasi pada pelaporan administratif kepada lembaga pemerintahan.⁴

Akuntabilitas sosial juga berkaitan dengan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian mengenai pemerintahan desa di Indonesia menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan komitmen organisasi berhubungan dengan akuntabilitas pemerintahan desa, sedangkan transparansi berhubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa tata kelola desa membutuhkan keterbukaan informasi sekaligus kapasitas kelembagaan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat.⁵

Dalam pengelolaan sumber daya desa, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana program direncanakan, sumber daya dialokasikan, dan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Wijaya menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa melalui keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Temuan ini menegaskan bahwa masyarakat bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga dapat berperan dalam mengawasi penggunaan sumber daya publik.⁶

Penelitian Pramudya juga menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas sosial dalam pengelolaan keuangan desa dapat diperkuat melalui keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah, seperti musyawarah dusun, musyawarah desa, dan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Namun, partisipasi tersebut perlu disertai ruang untuk menyampaikan informasi, memberikan masukan, dan memperoleh respons pemerintah.⁷ Dengan demikian, forum musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai ruang penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme pertanggungjawaban antara pemerintah desa dan masyarakat.

⁴ Dekki Umamur Ra'is, "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 109–18.

⁵ Muhammad Husni, Ratna Ayu Damayanti, and Aini Indrijawati, "The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust," *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 2 (2023): 450–61.

⁶ Andy Fefta Wijaya et al., "A Corruption Prevention Policy Management In The Village Government Financial Management Through Social Accountability : Evidence From Indonesia," *Academy of Strategic Management Journal* 21, no. 2 (2022): 1–10.

⁷ Arya Ananta Pramudya and Hendri Koeswara, "Akuntabilitas Sosial Dalam Praktik : Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Wacana Kinerja* 28, no. November (2025): 139–62.

Persoalan lain muncul ketika akuntabilitas desa lebih dominan berbentuk akuntabilitas vertikal. Nurjaman menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih kuat dipengaruhi oleh mekanisme pertanggungjawaban kepada pemerintah di tingkat atas. Kondisi tersebut dapat membatasi penguatan kontrol masyarakat dari bawah. Akuntabilitas sosial karena itu perlu dikembangkan untuk melengkapi mekanisme administratif dengan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, memberikan penilaian, dan menyampaikan tuntutan kepada pemerintah desa.⁸

Penguatan akuntabilitas sosial menjadi semakin relevan ketika ditempatkan dalam kerangka inklusi sosial. Penelitian Yakub menunjukkan bahwa keterlibatan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, anak, lanjut usia, dan masyarakat miskin, dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan sekaligus memperkuat akuntabilitas sosial. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa forum kelompok rentan dan Sekolah Lapang Desa Inklusi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi serta melembagakan nilai keadilan sosial dalam tata kelola desa.⁹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kelompok rentan tidak cukup dilakukan dengan mengundang mereka ke dalam forum pembangunan. Mereka perlu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk menggunakan ruang partisipasi tersebut. Pendekatan pembelajaran partisipatif menjadi relevan karena memungkinkan masyarakat menghubungkan pengetahuan dengan pengalaman dan persoalan yang mereka hadapi. Raman menunjukkan bahwa pendekatan Sekolah Lapang dalam program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa di 224 desa dapat memperluas keterlibatan perempuan, kelompok marginal, kelompok rentan, masyarakat umum, lembaga desa, dan penyandang disabilitas. Pendekatan tersebut juga berkembang menjadi ruang advokasi warga dalam proses perencanaan pembangunan desa.¹⁰

Konteks Desa Kombeng Indah memberikan alasan empiris untuk mengembangkan pendekatan tersebut. Observasi mengenai partisipasi masyarakat di Desa Kombeng Indah menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, antara lain melalui penyampaian saran dan pendapat serta kontribusi dalam kegiatan pembangunan. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai informasi awal bahwa Desa Kombeng Indah telah memiliki pengalaman partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kegiatan pengabdian yang lebih baru di Desa Kombeng Indah juga menunjukkan adanya ruang partisipasi sosial masyarakat melalui kegiatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa modal sosial dan ruang interaksi masyarakat telah tersedia. Namun, partisipasi sosial dalam kegiatan kemasyarakatan belum secara otomatis menghasilkan kemampuan masyarakat untuk menjalankan fungsi akuntabilitas sosial. Partisipasi tersebut perlu dikembangkan menuju kemampuan mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, memantau pembangunan, dan memberikan umpan balik kepada pemerintah desa.¹¹

Berdasarkan literatur tersebut, terdapat kesenjangan utama yang menjadi dasar kegiatan PKM ini. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa kelompok rentan masih menghadapi

⁸ Rusman Nurjaman, "Melawan Korupsi Dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 20, no. 1 (2018): 31–48.

⁹ Muhammad Yakub et al., "Inklusi Sosial Dan Akuntabilitas Desa (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berkeadilan Di Kabupaten Lombok Utara)," *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 13, no. 3 (2025): 1–10.

¹⁰ Asrul Raman, "Penguatan Inklusi Sosial Dan Akuntabilitas Sosial Desa Melalui Pendekatan Sekolah Lapang : Studi Program P3PD Lakpesdam PBNU Di 224 Desa," *Tashwirul Afkar* 44, no. 2 (2025): 235–63.

¹¹ Bintang Christopher Manuel and Wira Bharata, "Peningkatan Partisipasi Dan Hubungan Sosial Masyarakat Desa Kombeng Indah Melalui Perlombaan Sepak Bola," *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2026): 853–57.

hambatan dalam memperoleh akses dan pengaruh terhadap proses pembangunan. Penelitian mengenai forum desa juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum selalu menghasilkan akuntabilitas pemerintah. Pada saat yang sama, penelitian mengenai inklusi sosial menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat dapat memperkuat keterlibatan kelompok rentan dan akuntabilitas sosial. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menghubungkan penguatan kapasitas masyarakat rentan dengan praktik akuntabilitas sosial di tingkat desa.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar kegiatan “Penguatan Peran Masyarakat Rentan dalam Pembangunan Desa melalui Pelatihan Akuntabilitas Sosial di Desa Kombeng Indah.” Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat rentan dalam memahami hak dan peran mereka dalam pembangunan desa, mengakses informasi pembangunan, mengidentifikasi persoalan, menyampaikan aspirasi, melakukan pemantauan, serta memberikan umpan balik kepada pemerintah desa. Pelatihan tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan praktis yang dapat digunakan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelatihan akuntabilitas sosial juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa. Masyarakat membutuhkan ruang dan kapasitas untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif. Pemerintah desa membutuhkan mekanisme untuk menerima dan merespons aspirasi tersebut. Hubungan yang lebih terbuka dapat memperkuat kepercayaan, meningkatkan kualitas informasi pembangunan, dan mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Keberhasilan perlu dilihat dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menjalankan praktik akuntabilitas sosial. Indikatornya dapat mencakup kemampuan memahami konsep akuntabilitas sosial, mengidentifikasi persoalan pembangunan, mengakses informasi, menyusun aspirasi, menyampaikan keluhan, serta melakukan pemantauan sederhana. Pengukuran dapat dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, diskusi kelompok, simulasi, observasi, dan evaluasi tindak lanjut.

Dengan demikian, kegiatan PKM ini menempatkan masyarakat rentan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat. Pelatihan akuntabilitas sosial menjadi instrumen pemberdayaan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menggunakan ruang partisipasi dan menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Pendekatan tersebut mempertemukan tiga agenda penting dalam pembangunan desa, yaitu pemberdayaan masyarakat, inklusi sosial, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan Desa Kombeng Indah yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.

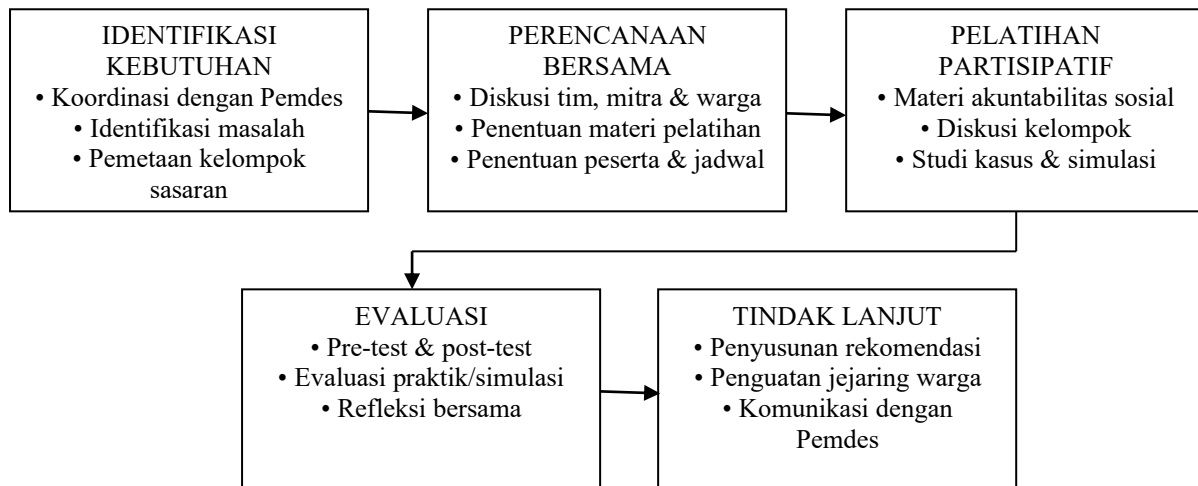
METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan menempatkan masyarakat rentan sebagai subjek utama di Desa Kombeng Indah, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pemerintah desa berperan sebagai mitra pendukung dalam menentukan peserta, memfasilitasi kegiatan, dan menyediakan informasi yang relevan. Perencanaan aksi dilakukan melalui diskusi dan identifikasi kebutuhan bersama antara tim PKM, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat untuk mengidentifikasi hambatan partisipasi, akses informasi, penyampaian aspirasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat.

Strategi kegiatan menggunakan pelatihan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. Materi mencakup konsep akuntabilitas sosial, hak dan

peran masyarakat dalam pembangunan desa, akses informasi, identifikasi persoalan, penyusunan aspirasi, mekanisme pengaduan, dan pemantauan pembangunan. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta, sedangkan diskusi dan simulasi digunakan untuk menilai kemampuan peserta dalam menerapkan konsep akuntabilitas sosial pada persoalan pembangunan di lingkungan mereka.

Tahapan kegiatan disusun sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram alur tahapan kegiatan PKM

HASIL

Kegiatan PKM “Penguatan Peran Masyarakat Rentan dalam Pembangunan Desa melalui Pelatihan Akuntabilitas Sosial di Desa Kombeng Indah” dilaksanakan dengan melibatkan 20 orang masyarakat rentan sebagai peserta utama, Lakpesdam Kutai Timur sebagai fasilitator, dan Pemerintah Desa Kombeng Indah sebagai mitra pendukung. Peserta terdiri atas 8 orang representasi perempuan, 2 orang pemuda, 5 orang remaja dan anak, serta 5 orang perwakilan kesukuan dan agama. Komposisi tersebut menunjukkan upaya kegiatan untuk menghadirkan ruang partisipasi yang melibatkan kelompok masyarakat dengan latar belakang dan pengalaman yang beragam. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai akuntabilitas sosial, peran masyarakat dalam pembangunan desa, hak memperoleh informasi, penyampaian aspirasi, serta pemantauan pembangunan. Materi disampaikan secara interaktif agar peserta dapat menghubungkan konsep akuntabilitas sosial dengan kondisi dan persoalan pembangunan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

Selama kegiatan, peserta terlibat dalam diskusi dan menyampaikan pengalaman mengenai keterlibatan mereka dalam proses pembangunan desa. Diskusi menjadi ruang bagi peserta untuk mengidentifikasi berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, baik melalui penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam forum desa, maupun pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta dapat mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan Nadhiro dan Choiriyah yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berlangsung melalui forum dusun, perencanaan pembangunan, dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana desa.¹²

¹² Nadhiro and Ilmi Usrotin Choiriyah, “Community Participation in Village Development Planning.”



Gambar 2. Proses penyampaian materi kepada peserta pelatihan akuntabilitas sosial di Kantor Desa Kombeng Indah

Pelatihan selanjutnya diarahkan pada praktik akuntabilitas sosial melalui studi kasus dan simulasi. Peserta diminta mengidentifikasi persoalan pembangunan di lingkungan mereka, menyusun aspirasi, serta menentukan langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan masukan kepada pemerintah desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mulai mampu membedakan antara keluhan, aspirasi, dan bentuk pengawasan masyarakat. Peserta juga menunjukkan keterlibatan yang lebih aktif ketika pembelajaran menggunakan persoalan yang dekat dengan kondisi kehidupan mereka. Hasil tersebut memperkuat temuan Kusmayadi, Weni, dan Jatmikowati bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan dapat meningkatkan keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, evaluasi, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan.¹³



Gambar 3. Kelompok pemuda peserta pelatihan akuntabilitas sosial sedang melakukan pemetaan masalah akuntabilitas sosial di Desa Kombeng Indah



Gambar 4. Kelompok perempuan peserta pelatihan akuntabilitas sosial sedang melakukan pemetaan masalah akuntabilitas sosial di Desa Kombeng Indah

Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, serta observasi terhadap keterlibatan peserta selama diskusi dan simulasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep akuntabilitas sosial, akses informasi, penyampaian aspirasi, dan pengawasan pembangunan. Nilai rata-rata *pre-test* sebesar 72 meningkat

¹³ Rudy Catur R Kusmayadi, I Made Weni, and Sri Hartini Jatmikowati, "Community Participation in Village Development (Social Reality Study in the Village Development Process in Wandanpuro Village, Bululawang District, Malang Regency)," *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 5, no. 6 (2024): 124–45.

menjadi 88 pada *post-test*, atau meningkat sebesar 22%. Selain perubahan pengetahuan, peserta mampu merumuskan beberapa bentuk tindak lanjut, seperti meningkatkan komunikasi dengan pemerintah desa, menggunakan forum masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, serta mengikuti perkembangan pelaksanaan pembangunan. Pola pelatihan yang menggabungkan penyampaian materi, kasus, simulasi, dan evaluasi juga menunjukkan relevansi pendekatan pembelajaran praktis dalam kegiatan penguatan kapasitas masyarakat. Studi PKM Tuanaya dkk. menunjukkan bahwa pelatihan interaktif, klinik kasus, simulasi, dan evaluasi *pre-test-post-test* dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik akuntabilitas pada pengelolaan desa.¹⁴

Secara keseluruhan, kegiatan menghasilkan tiga capaian utama, yaitu peningkatan pemahaman masyarakat rentan mengenai akuntabilitas sosial, peningkatan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan menyampaikan persoalan pembangunan, serta terbentuknya kesadaran mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengakses informasi dan memantau pembangunan desa. Hasil tersebut menjadi dasar bagi penguatan keterlibatan masyarakat rentan dalam proses pembangunan Desa Kombeng Indah secara berkelanjutan.



Gambar 5. Dokumentasi pasca pelatihan akuntabilitas sosial Desa Kombeng Indah

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa penguatan kapasitas masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun praktik akuntabilitas sosial di tingkat desa. Kegiatan melibatkan 20 peserta yang berasal dari kelompok perempuan, remaja/anak, serta perwakilan suku dan agama. Komposisi tersebut memberikan ruang bagi kelompok dengan pengalaman dan kebutuhan yang berbeda untuk terlibat dalam proses pembelajaran. Keterlibatan lintas kelompok menjadi penting karena partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya forum, tetapi juga oleh kemampuan berbagai kelompok untuk menggunakan ruang tersebut dalam menyampaikan kepentingannya. Penelitian Kusmayadi, Weni, dan Jatmikowati menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperkuat kualitas pembangunan desa ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Pada saat yang sama, penelitian tersebut mengidentifikasi keterbatasan informasi, sosialisasi, keterampilan, dan akses sebagai faktor yang dapat menghambat partisipasi masyarakat.¹⁵

Dalam konteks tersebut, pelatihan akuntabilitas sosial tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan transfer pengetahuan. Pelatihan menjadi ruang untuk mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman masyarakat. Diskusi dan studi kasus memungkinkan peserta

¹⁴ Wahab Tuanaya, Jusuf Madubun, and Muhtar, "Desa Berdaya , Anggaran Terjaga : Sosialisasi Anti-Fraud Dan Akuntabilitas Dana Desa Di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai , Kabupaten Maluku Tengah," *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 332–340.

¹⁵ Kusmayadi, Weni, and Jatmikowati, "Community Participation in Village Development (Social Reality Study in the Village Development Process in Wandanpuro Village, Bululawang District, Malang Regency)."

mengidentifikasi persoalan pembangunan yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Peserta kemudian diarahkan untuk melihat persoalan tersebut dari perspektif hak, tanggung jawab, dan peran masyarakat. Proses ini penting karena akuntabilitas sosial membutuhkan masyarakat yang mampu mengenali masalah publik, memperoleh informasi yang relevan, menyampaikan tuntutan, dan membangun komunikasi dengan pemerintah. Penelitian Haryanto, Berenschot, dan Aspinall menunjukkan bahwa forum desa memang dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, tetapi partisipasi tersebut tidak selalu menghasilkan akuntabilitas. Dalam sejumlah kasus, forum masih didominasi elite dan masyarakat cenderung menyampaikan kritik secara hati-hati.¹⁶

Temuan tersebut memberikan konteks penting bagi kegiatan PKM di Desa Kombeng Indah. Penguatan peran masyarakat rentan tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan mereka dalam forum pembangunan. Masyarakat juga perlu memiliki kapasitas untuk menggunakan forum tersebut secara bermakna. Dalam kegiatan ini, peserta dilatih untuk mengidentifikasi masalah, menyusun aspirasi, memahami akses informasi, serta mengenali bentuk pemantauan sosial. Dengan demikian, pendekatan yang digunakan bergerak dari sekadar *participation as attendance* menuju partisipasi sebagai kemampuan untuk menyampaikan kepentingan dan melakukan kontrol sosial. Perubahan cara pandang tersebut menjadi salah satu hasil penting dari kegiatan karena masyarakat ditempatkan sebagai aktor yang memiliki peran dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat program.

Peningkatan pengetahuan sebesar 22% memperkuat temuan bahwa pelatihan memberikan perubahan pada pemahaman peserta. Namun, angka tersebut tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan kegiatan. Perubahan yang lebih penting terlihat pada proses interaksi selama diskusi dan simulasi, terutama ketika peserta mulai menghubungkan konsep akuntabilitas sosial dengan persoalan konkret di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelatihan tidak hanya bergantung pada jumlah materi yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuan metode pembelajaran untuk menghubungkan konsep dengan pengalaman peserta. Pendekatan berbasis kasus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami bahwa akuntabilitas sosial dapat dilakukan melalui tindakan sederhana, seperti meminta informasi, menyampaikan aspirasi secara terstruktur, mengikuti forum desa, dan memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Aspek lain yang penting adalah akses terhadap informasi. Masyarakat tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif apabila informasi pembangunan sulit diperoleh atau disampaikan dalam bentuk yang tidak mudah dipahami. Akuntabilitas karena itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melaporkan kegiatan, tetapi juga membutuhkan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menggunakan informasi tersebut. Penelitian Rahmah dan Nor terhadap 340 responden di 148 desa menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat, sedangkan transparansi berkontribusi terhadap kepercayaan melalui pengelolaan dana desa. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan dan keterlibatan masyarakat memiliki konsekuensi terhadap hubungan kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.¹⁷

Dari sisi kelompok sasaran, keterlibatan perempuan, remaja/anak, serta perwakilan suku dan agama menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial perlu dibangun melalui pendekatan yang

¹⁶ Haryanto, Berenschot, and Aspinall, "Participation without Accountability: Deliberative Democracy in Village Indonesia."

¹⁷ Linda Rahmah and Wahyudin Nor, "Building Community Trust : The Effect of Accountability , Transparency , and Community Participation in Village Fund Management," *JIAKES: Jurnal Ilmiah AkuntansiKesatuan* 13, no. 6 (2025): 2087–2102.

inklusif. Kelompok yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda terhadap pembangunan dan pelayanan desa. Karena itu, mekanisme partisipasi yang hanya mengandalkan kelompok masyarakat yang selama ini aktif berpotensi mengabaikan kebutuhan kelompok lainnya. Pelatihan menjadi ruang awal untuk memperluas basis partisipasi tersebut. Namun, keberagaman peserta juga menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan berikutnya perlu memperhatikan karakteristik masing-masing kelompok, terutama dalam penggunaan bahasa, bentuk materi, dan metode komunikasi.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas sosial membutuhkan hubungan dua arah. Masyarakat perlu memiliki kapasitas untuk menyampaikan aspirasi, tetapi pemerintah desa juga perlu menyediakan ruang untuk menerima dan merespons aspirasi tersebut. Apabila masyarakat telah memiliki kemampuan menyampaikan masukan tetapi tidak memperoleh respons, maka partisipasi berpotensi berhenti pada penyampaian pendapat. Sebaliknya, keterbukaan pemerintah tanpa keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan akuntabilitas yang bersifat administratif dan belum tentu menjawab kebutuhan warga. Karena itu, keberlanjutan kegiatan perlu diarahkan pada penguatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa melalui forum musyawarah, penyampaian informasi, dan mekanisme umpan balik.

Dalam konteks pengelolaan pembangunan desa, hubungan tersebut semakin penting karena masyarakat memiliki posisi strategis dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan dan kondisi lokal. Penelitian terbaru tentang tata kelola keuangan desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas secara bersama-sama berkontribusi terhadap pengelolaan pemerintahan desa yang lebih efektif dan akuntabel. Studi tersebut juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi kelompok rentan dan ketimpangan akses informasi masih menjadi hambatan dalam tata kelola desa.¹⁸ Temuan ini memperkuat relevansi kegiatan PKM yang secara khusus menempatkan masyarakat rentan sebagai sasaran penguatan kapasitas.

Berdasarkan hasil tersebut, keberlanjutan kegiatan tidak cukup dilakukan melalui pelatihan lanjutan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu mengembangkan mekanisme sederhana yang memungkinkan pengetahuan yang diperoleh peserta digunakan dalam praktik. Beberapa bentuk tindak lanjut dapat berupa keterlibatan peserta dalam forum pembangunan, penyampaian aspirasi secara terstruktur, pemantauan program desa, serta komunikasi berkala dengan pemerintah desa. Peserta yang telah mengikuti pelatihan juga dapat berperan sebagai penghubung informasi di lingkungan masing-masing. Dengan cara ini, manfaat kegiatan tidak berhenti pada peserta, tetapi berpotensi menyebar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Dengan demikian, kegiatan PKM di Desa Kombeng Indah memperlihatkan bahwa penguatan akuntabilitas sosial perlu dipahami sebagai proses pemberdayaan, bukan sekadar penyampaian materi mengenai tata kelola pemerintahan desa. Pelatihan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan awal bagi masyarakat untuk memahami hak, mengakses informasi, menyampaikan aspirasi, dan melakukan pemantauan. Keterlibatan peserta dari berbagai kelompok sosial memperkuat dimensi inklusif kegiatan, sementara peningkatan pengetahuan sebesar 22% menunjukkan adanya capaian pada aspek kognitif. Tantangan berikutnya terletak pada bagaimana kapasitas tersebut diterjemahkan menjadi praktik partisipasi yang berkelanjutan dan bagaimana pemerintah desa menyediakan ruang yang responsif terhadap keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, penguatan masyarakat rentan dapat menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola Desa Kombeng Indah yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel.

¹⁸ Delpi Susanti et al., "Impacts of Community Participation , Multi-Actor Collaboration , Transparency , and Accountability on Village Financial Governance in Rokan Hulu , Indonesia," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 1 (2025): 234–50.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “Penguatan Peran Masyarakat Rentan dalam Pembangunan Desa melalui Pelatihan Akuntabilitas Sosial di Desa Kombeng Indah” menunjukkan bahwa pelatihan partisipatif dapat menjadi sarana untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan menjalankan perannya dalam pembangunan desa. Kegiatan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas perempuan, remaja/anak, serta perwakilan suku dan agama. Pendekatan melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan konsep akuntabilitas sosial dengan persoalan pembangunan yang mereka hadapi.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta sebesar 22% setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman mengenai hak dan peran masyarakat, akses informasi, penyampaian aspirasi, serta pemantauan pembangunan desa. Selain capaian kognitif, kegiatan juga mendorong peserta untuk mengenali persoalan pembangunan, merumuskan aspirasi, dan memahami bentuk keterlibatan yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan desa.

Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas sosial tidak cukup dilakukan melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Keberlanjutannya membutuhkan ruang partisipasi yang inklusif, akses informasi yang terbuka, serta respons pemerintah desa terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tindak lanjut kegiatan perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat rentan dalam forum pembangunan, penguatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa, serta pemantauan pembangunan secara partisipatif. Dengan demikian, penguatan kapasitas masyarakat dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan Desa Kombeng Indah yang lebih partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

- Haryanto, Ward Berenschot, and Edward Aspinall. “Participation without Accountability : Deliberative Democracy in Village Indonesia.” *South East Asia Research* 33, no. 1 (2025): 49–67.
- Husni, Muhammad, Ratna Ayu Damayanti, and Aini Indrijawati. “The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust.” *Journal of Accounting and Investment* 24, no. 2 (2023): 450–61.
- Kusmayadi, Rudy Catur R, I Made Weni, and Sri Hartini Jatmikowati. “Community Participation in Village Development (Social Reality Study in the Village Development Process in Wandanpuro Village, Bululawang District, Malang Regency).” *International Journal of Research in Social Science and Humanities* 5, no. 6 (2024): 124–45.
- Manuel, Bintang Christopher, and Wira Bharata. “Peningkatan Partisipasi Dan Hubungan Sosial Masyarakat Desa Kombeng Indah Melalui Perlombaan Sepak Bola.” *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2026): 853–57.
- Nadhiro, Riza Ayu, and Ilmi Usrotin Choiriyah. “Community Participation in Village Development Planning.” *Indonesian Journal of Public Policy Review* 25 (2024): 1–19.
- Nurjaman, Rusman. “Melawan Korupsi Dari Bawah: Strategi Penguatan Akuntabilitas Lokal Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 20, no. 1 (2018): 31–48.
- Pramudya, Arya Ananta, and Hendri Koeswara. “Akuntabilitas Sosial Dalam Praktik : Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Wacana Kinerja* 28, no. November (2025): 139–62.
- Ra’is, Dekki Umamur. “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial.” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 109–18.

- Rahmah, Linda, and Wahyudin Nor. "Building Community Trust: The Effect of Accountability , Transparency , and Community Participation in Village Fund Management." *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 13, no. 6 (2025): 2087–2102.
- Raman, Asrul. "Penguatan Inklusi Sosial Dan Akuntabilitas Sosial Desa Melalui Pendekatan Sekolah Lapang: Studi Program P3PD Lakpesdam PBNU Di 224 Desa." *Tashwirul Afkar* 44, no. 2 (2025): 235–63.
- Rof'ah, Astri Hanjarwati, and Jamil Suprihatiningrum. "The Long Road to Social Inclusion : Participation of Vulnerable Groups in Village Development." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2022, 119–229.
- Susanti, Delpi, Sujianto, Harapan Tua, Hasim As'ari, and Dinda Yulia. "Impacts of Community Participation , Multi-Actor Collaboration , Transparency , and Accountability on Village Financial Governance in Rokan Hulu , Indonesia." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 15, no. 1 (2025): 234–50.
- Tuanaya, Wahab, Jusuf Madubun, and Muhtar. "Desa Berdaya , Anggaran Terjaga : Sosialisasi Anti-Fraud Dan Akuntabilitas Dana Desa Di Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai , Kabupaten Maluku Tengah." *Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2025): 332–40.
- Wijaya, Andy Fefta, Universitas Brawijaya, Tjahnulin Domai, and Universitas Brawijaya. "A Corruption Prevention Policy Management In The Village Government Financial Management Through Social Accountability : Evidence From Indonesia." *Academy of Strategic Management Journal* 21, no. 2 (2022): 1–10.
- Yakub, Muhammad, Jayadi, Muhammad Mahfuz, and Dedi Riswandi. "Inklusi Sosial Dan Akuntabilitas Desa (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Berkeadilan Di Kabupaten Lombok Utara)." *Inovasi Pembangunan – Jurnal Kelitbangan* 13, no. 3 (2025): 1–10.